



Gender, Power, and Regional Political Hegemony: A Critical Framing Analysis of Sherly Tjoanda's Representation in North Maluku Online Media

(Gender, Kekuasaan, dan Hegemoni Politik Regional: Analisis Framing Kritis terhadap Representasi Sherly Tjoanda dalam Media Daring Maluku Utara)

Julaiha Hi.Amin ¹✉

¹ Program studi ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate, Indonesia.

✉ Email: Julaiha.Amin1508@gmail.com

Info Artikel : <input checked="" type="checkbox"/> Artikel Penelitian <input type="checkbox"/> Artikel Pengabdian <input type="checkbox"/> Riview Artikel
Diterima : 18 Mei 2026, Disetujui : 4 Juni 2026, Publikasi On-Line : 7 Juni 2026

Abstract

This study analyzes how local online media frames female leadership within the nexus of gender relations and regional political hegemony, focusing on the news coverage of Sherly Tjoanda Laos on Nuansamalut.com. Employing a qualitative approach with Pan and Kosicki's critical framing analysis model, this research examines four major news articles published during the first three months post-inauguration (February-May 2025), interpreted through the lenses of Gramscian hegemony and gender theories. The findings reveal a systematic transformation of framing across four distinct phases: gender symbolization, technocratic leadership construction, policy breakthrough legitimation, and the consolidation of moral authority. Critically, this study demonstrates that the representation of female leadership transcends traditional stereotypes, shifting toward the construction of "technocratic femininity" a legitimacy anchored in administrative capacity and policy performance which paradoxically operates within the framework of central power hegemony. This study offers a novel theoretical contribution by deconstructing the concept of technocratic femininity within the conceptualization of localized gender politics. Practically, it serves as a critical evaluative guide for local media to move beyond acting as consensus-production agents for dominant power structures, and instead become drivers of transformative gender emancipation within regional democracy.

📖 **Keyword:** *Critical Framing Analysis; Political Hegemony; Female Leadership; Technocratic Femininity; Sherly Tjoanda Laos.*

I. PENDAHULUAN

Fenomena kepemimpinan perempuan dalam politik lokal Indonesia tidak dapat dilepaskan dari relasi antara gender, kekuasaan, dan hegemoni politik regional (Ortner,1989; Prys,2010; De Simone et al,2018). Dalam struktur masyarakat yang patriarkal, kehadiran perempuan di jabatan eksekutif sering kali dibingkai sebagai peristiwa simbolik yang sarat makna identitas, afiliasi, dan legitimasi sosial,

melampaui sekadar kapasitas kepemimpinannya. Pemberitaan mengenai Sherly Tjoanda Laos sebagai Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara oleh *Nuansamalut.com* menjadi ruang analitis penting untuk mengkaji praktik *framing* tersebut. Media daring lokal ini tidak sekadar menyampaikan, melainkan aktif memproduksi makna wacana kepemimpinan, otoritas, dan legitimasi politik perempuan. Melalui perspektif konstruksionis, berita dipahami bukan sebagai refleksi objektif realitas, melainkan hasil negosiasi

ideologis yang mengonstruksi kelayakan seorang pemimpin (Lau, 2012; Rakowski et al., 2025; Martinisi, 2025). Pada titik inilah, pembingkai media memegang peran krusial dalam membentuk persepsi publik, sekaligus menentukan bagaimana otoritas politik perempuan dinegosiasikan di tengah kuatnya budaya patriarki daerah.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa framing media terhadap politisi perempuan cenderung mengandung bias simbolik dan representasional. Studi di Amerika Serikat dan Eropa menemukan bahwa politisi perempuan sering direpresentasikan melalui narasi emosional, domestik, atau berbasis karakter personal dibandingkan kompetensi teknokratis (Pildes and Anderson, 1990; Quinn Hegarty, 2025). Di Asia Tenggara, penelitian mengenai kepemimpinan perempuan di Filipina dan Malaysia menunjukkan bahwa media kerap mengaitkan legitimasi perempuan dengan relasi kekerabatan politik atau tragedi personal, bukan pada kapasitas institusional (Resnyansky et al., 2024.; Sinpeng and Savirani, 2022; Roces, 2022; Vijayarasa, 2022)

Kajian framing di Indonesia terhadap politisi perempuan dalam media online memperlihatkan kecenderungan dualitas yaitu antara simbol kemajuan kesetaraan gender dan objek stereotip yang dilekatkan pada feminitas atau identitas keluarga (Firdausy, 2022; Aliyamsyah Siregar et al., 2025). Namun, sebagian besar studi tersebut berfokus pada level nasional atau pada kontestasi elektoral, sementara dinamika framing pasca-pelantikan dalam konteks politik daerah masih relatif terbatas.

Keterbatasan literatur tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan penelitian dalam tiga aspek utama. Pertama, kurangnya kajian yang mengintegrasikan analisis *framing* dengan perspektif hegemoni politik regional untuk membaca peran media lokal dalam menormalisasi atau memperkuat konfigurasi kekuasaan tertentu. Kedua, penelitian mengenai politisi perempuan di Indonesia cenderung berpusat pada isu representasi simbolik, tanpa menggali bagaimana narasi media membangun citra teknokratis, akuntabel, dan terhubung dengan kekuasaan pusat sebagai bentuk legitimasi baru. Ketiga, kawasan timur Indonesia, khususnya Maluku Utara, masih luput sebagai *locus* kajian komunikasi politik kontemporer. Padahal, wilayah kepulauan ini memiliki signifikansi geopolitik yang krusial, dinamika

relasi pusat-daerah yang asimetris, kuatnya pengaruh patronase politik lokal, serta pluralitas sosioreligius di dalamnya menghadirkan konfigurasi hegemoni yang unik. Meneliti wilayah ini menjadi sangat relevan karena potret komunikasinya mampu mendekonstruksi bagaimana wacana gender dan kekuasaan diproduksi di luar batas episentrum politik Jawa (*Java-centric*), memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai realitas demokrasi regional di Indonesia.

Penelitian ini menawarkan kebaruan pada level konseptual dan empiris. Secara konseptual, studi ini mengintegrasikan model framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dengan pendekatan hegemoni Gramscian untuk membaca bagaimana struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik dalam teks berita berkontribusi pada produksi legitimasi kekuasaan perempuan dalam politik regional (Mahdi, 2015; Sari and Syas, 2023; Sonjaya et al., 2024; Pan and Kosicki, 1993). Secara empiris, penelitian ini memfokuskan analisis pada pemberitaan tiga bulan awal pasca-pelantikan Sherly Tjoanda di Nuansamalut.com, sehingga mampu menangkap fase mendasar pembentukan citra publik. Temuan awal dalam dokumen penelitian menunjukkan adanya pola framing yang bergerak dari simbolisasi “gubernur perempuan pertama” menuju konstruksi kepemimpinan teknokratis, tegas, dan akuntabel. Transformasi naratif ini mengindikasikan proses normalisasi kekuasaan melalui bahasa media yang sistematis dan konsisten.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media online lokal membingkai kepemimpinan Sherly Tjoanda dalam relasi gender dan hegemoni politik regional. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) Bagaimana struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik dalam pemberitaan Nuansamalut.com membentuk representasi kepemimpinan Sherly Tjoanda? (2) Bagaimana framing tersebut mereproduksi atau menegosiasikan relasi gender dan konfigurasi kekuasaan pusat-daerah? (3) Dalam kerangka hegemoni, nilai dan ideologi apa yang dinormalisasi melalui konstruksi berita tersebut?.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan critical framing analysis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan mendeskripsikan struktur

teks, tetapi juga menafsirkan bagaimana makna tentang gender dan kekuasaan diproduksi serta dinormalisasi melalui praktik jurnalistik. Secara epistemologis, penelitian ini berada dalam paradigma konstruktivis-kritis yang memandang realitas media sebagai hasil produksi sosial yang sarat kepentingan ideologis (Walker et al. 2020)

Unit analisis penelitian adalah empat berita utama mengenai kepemimpinan Sherly Tjoanda Laos yang dipublikasikan oleh Nuansamalut.com dalam rentang Februari-Mei 2025, yakni periode tiga bulan awal pasca-pelantikan. Pemilihan periode ini bersifat purposive karena fase awal kepemimpinan merupakan momen krusial dalam pembentukan citra politik dan legitimasi publik. Berdasarkan dokumen penelitian sebelumnya, keempat berita tersebut merepresentasikan fase naratif yang berbeda: simbolisasi historis, konstruksi 100 hari kerja, terobosan kebijakan kesehatan, dan penegasan tata kelola anggaran.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua metode. Pertama, dokumentasi arsip digital berita yang diunduh secara langsung dari situs resmi media. Kedua, wawancara semi-terstruktur dengan redaksi untuk memahami konteks produksi berita, proses editing release humas, serta kebijakan redaksional. Wawancara ini berfungsi sebagai data kontekstual, bukan sebagai objek framing, sehingga analisis tetap berfokus pada teks sebagai locus utama konstruksi makna.

Prosedur analisis

Pertama adalah identifikasi perangkat framing berdasarkan model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, yang meliputi struktur sintaksis (headline, lead, kutipan, penutup), skrip (alur 5W+1H), tematik (koherensi antar paragraf, proposisi dominan), dan retorik (pilihan diksi, metafora, grafis). Pada tahap ini dilakukan open coding untuk menandai pola repetisi kata, metafora kunci seperti “naik kelas”, “terobosan”, “tegas”, serta penekanan numerik seperti “50 persen” dan nominal anggaran spesifik.

Kedua adalah axial coding, yaitu mengelompokkan temuan framing ke dalam kategori besar representasi: (1) simbol gender dan sejarah, (2) kepemimpinan teknokratis, (3) legitimasi pusat-daerah, dan (4) moralitas tata kelola. Kategori ini tidak ditentukan secara apriori, melainkan muncul melalui pembacaan intensif dan komparatif antar teks.

Ketiga adalah interpretasi kritis menggunakan teori hegemoni. Pada tahap ini, framing yang telah teridentifikasi dianalisis untuk melihat bagaimana narasi media berkontribusi pada produksi consent politik. Misalnya, penekanan berulang pada keselarasan visi dengan presiden dibaca sebagai bentuk integrasi simbolik ke dalam hegemoni nasional. Dengan kata lain, analisis bergerak dari level tekstual ke level ideologis.

Keempat, adalah analisis gender kritis. Pada tahap ini diuji apakah konstruksi kepemimpinan perempuan dalam teks mereproduksi stereotip tradisional (emosional, simbolik, domestik) atau justru membangun legitimasi berbasis kapasitas teknokratis. Proses ini memungkinkan pembacaan dialektis: framing dapat sekaligus membuka ruang emansipasi dan menegosiasikannya dalam struktur kekuasaan dominan.

Penelitian ini menerapkan strategi triangulasi sumber (teks berita dan wawancara redaksi) serta peer debriefing melalui diskusi akademik terbatas. Transparansi prosedur coding dan kategorisasi dilakukan dengan menyimpan matriks analisis teks yang dapat diaudit secara metodologis. Pendekatan ini penting agar penelitian framing tidak dianggap sekadar interpretasi subjektif, melainkan memiliki jejak analitis yang dapat ditelusuri. Secara geografis, konteks Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan di Indonesia Timur juga menjadi variabel kontekstual yang dipertimbangkan dalam interpretasi. Dinamika relasi pusat-daerah, pluralitas agama, serta sejarah politik lokal membentuk medan hegemoni yang berbeda dibandingkan wilayah metropolitan. Oleh karena itu, interpretasi dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosiopolitik regional, bukan sekadar struktur teks.

Penelitian berupaya menjembatani analisis mikro (bahasa dan struktur berita) dengan analisis makro (relasi kekuasaan dan hegemoni gender). Pendekatan semacam ini penting agar studi framing tidak berhenti pada deskripsi teknis, melainkan berkontribusi pada perdebatan teoretis tentang bagaimana media lokal membentuk legitimasi politik perempuan dalam demokrasi regional kontemporer.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Symbolis Gender Menuju Legitimasi Politik

Temuan menunjukkan bahwa pemberitaan awal mengenai Sherly Tjoanda Laos secara eksplisit menonjolkan label “gubernur perempuan pertama”. Pada level sintaksis, frasa tersebut ditempatkan dalam *headline* posisi dengan tingkat visibilitas tertinggi. Ini bukan sekadar deskripsi faktual, melainkan perangkat *framing* yang mengonstruksi peristiwa sebagai *milestone* sejarah. Dalam perspektif *framing*, penempatan ini berfungsi sebagai *anchor* makna yang membentuk interpretasi pembaca sejak awal (Pan dan Kosicki, 1993; Trabada dan Maneiro, 2026).

Menariknya, pada level tematik, narasi tidak berhenti pada simbol gender. Artikel segera memperluas konteks ke pelantikan nasional dan representasi keberagaman agama. Dengan demikian, gender tidak berdiri sebagai isu konflik, melainkan dilebur dalam narasi persatuan nasional. Di sinilah terjadi proses depolitisasi gender, sebuah mekanisme konseptual di mana identitas gender dicabut dari akar politisnya yang kritis seperti gugatan terhadap ketimpangan struktural atau relasi kuasa patriarkal lalu dikemas ulang menjadi sekadar komoditas visual atau variasi administratif yang netral. Identitas perempuan diakui, tetapi langsung dinormalisasi dalam kerangka harmoni dan konsensus normatif.

Perspektif hegemoni Gramscian, strategi ini beroperasi melalui apa yang disebut sebagai integrasi simbolik. Secara teoretis, integrasi simbolik adalah proses penyerapan elemen-elemen baru yang berpotensi subversif (dalam hal ini, kepemimpinan perempuan di wilayah yang maskulin) ke dalam sistem dominan dengan cara memberikan pengakuan formal tanpa mengubah struktur dasar kekuasaan tersebut. Media tidak memposisikan kepemimpinan perempuan sebagai tantangan terhadap struktur patriarki, melainkan sebagai bagian yang kompatibel dengan tatanan politik yang sudah mapan. Dengan kata lain, simbol emansipasi hadir tanpa mengganggu stabilitas hegemoni regional (Sari dan Syas, 2023).

Pola ini, *framing* media tidak lagi sekadar berfungsi pada tataran simbolik-kebahasaan, melainkan bermutasi menjadi strategi aktif dalam reproduksi hegemoni yang menjembatani kepentingan politik lokal dan nasional. Di tingkat lokal, *framing* ini meredam resistensi kelompok tradisional-patriarkal dengan mengemas kepemimpinan perempuan sebagai figur pemersatu yang inklusif. Sementara di tingkat nasional, peningkatan tersebut memproduksi legitimasi bahwa dinamika politik di daerah tetap

berjalan selaras dengan agenda stabilitas dan konsensus politik pusat. Dengan demikian, media daring lokal berhasil menjalankan perannya sebagai aparat hegemonik yang merawat keberlangsungan status quo kekuasaan di kedua level tersebut.

Reframing Teknokratis: Dari Emosi Menuju Otoritas Manajerial

Pemberitaan kedua mengenai evaluasi “100 hari kerja” memperlihatkan perubahan fokus peningkatan yang spesifik, yaitu bergeser dari narasi identitas gender yang bersifat simbolik menuju narasi kapasitas manajerial yang bercorak teknokratis-rasional. Diksi seperti “membenahi”, “prioritas”, serta penyebutan angka pemotongan anggaran sebesar 50 persen secara aktif membangun citra kepemimpinan yang berbasis pada data, efisiensi, dan kalkulasi logis. Secara retorik, penggunaan angka konkret dan terminologi fiskal ini berfungsi sebagai mekanisme legitimasi rasional. Dalam teori komunikasi politik, kuantifikasi performa seperti ini jamak digunakan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan persepsi kredibilitas, objektivitas, dan profesionalitas seorang pejabat publik di mata khalayak (Manurung et al., 2024; Ruray dan Pratama, 2020).

Perubahan orientasi peningkatan ini memiliki implikasi krusial dari perspektif gender karena secara radikal mendisrupsi batas-batas domestifikasi wacana yang biasanya melekat pada pemimpin perempuan. Sejumlah studi terdahulu mengenai *framing* gender menunjukkan bahwa politisi perempuan di ruang publik sering kali terjebak dalam peningkatan yang bias; Lotulung (2017) menggarisbawahi kuatnya dominasi stereotip emosionalitas perempuan dalam pemberitaan politik, sementara Hayat (2015) dan Basit (2022) menemukan bahwa media cenderung mereduksi kapasitas politik perempuan dengan hanya menonjolkan aspek moralitas personal atau peran domestik mereka sebagai figur ibu.

Kasus Sherly Tjoanda Laos di *Nuansamalut.com*, media lokal membangun narasi tantangan yang justru menekankan kompetensi manajerial yang keras. Konstruksi ini secara konsisten mengatasi, mendekonstruksi, dan menegosiasikan ulang stereotip tradisional tersebut. Melalui pemosisian ini, figur perempuan tidak lagi direduksi sebagai simbol sentimental, melainkan diproduksi sebagai administrator rasional yang memegang kendali penuh atas birokrasi.

Kendati demikian, pembacaan kritis berbasis perspektif hegemoni tetap perlu

diajukan. Rasionalitas teknokratis yang dibangun media ini tidak berdiri sendiri, melainkan dikonstruksi dalam kerangka keselarasan mutlak dengan pemerintah pusat. Dengan menekankan bahwa visi sang gubernur "selaras" dan "tegak lurus" dengan agenda presiden, media lokal secara halus mengaitkan legitimasi politik di tingkat regional ke dalam orbit kekuasaan nasional. Di sinilah hegemoni bekerja secara subtil dan canggih, posisi politik perempuan di daerah diangkat ke tatanan publik yang terhormat melalui bahasa sinkronisasi dan kemitraan strategis, namun di saat yang sama tetap ditempatkan dalam koridor subordinasi politik terhadap kekuasaan pusat yang dominan.

The Executive Turn: 'Naik Kelas' dan Narasi Terobosan

Pemberitaan mengenai peningkatan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menandai fase yang disebut sebagai *executive turn*, yaitu sebuah pergeseran fokus wacana di mana media secara intensif mengonstruksi figur pemimpin perempuan bukan lagi sekadar sebagai administrator birokrasi biasa, melainkan sebagai aktor eksekutif tangguh yang memiliki otoritas politik tinggi dan daya tembus kebijakan yang kuat. Dalam fase ini, kata "terobosan" dan metafora "naik kelas" digunakan oleh media lokal sebagai perangkat retorik utama. Secara definisi, metafora "naik kelas" di sini bukan sekadar menggambarkan perubahan status administratif atau peningkatan kelas fasilitas kesehatan, ini merupakan sebuah perangkat retorik yang menyiratkan terjadinya mobilitas sosial vertikal dan peningkatan martabat kolektif masyarakat daerah secara masif. Dalam analisis retorik, metafora semacam ini berfungsi sebagai jalan pintas kognitif sebuah cara cepat yang digunakan media untuk menyederhanakan realitas birokrasi yang kompleks dan teknis menjadi sebuah narasi kemajuan linier yang mudah dicerna dan didukung oleh publik (Lakoff dan Johnson, 1980; Charteris-Black, 2014). Dengan menandingkan nama gubernur bersama para pejabat kementerian di tingkat pusat, teks berita secara aktif membangun asosiasi simbolik yang kuat antara akses eksklusif ke lingkaran kekuasaan dengan jaminan hasil pembangunan yang konkret.

Pola pemberitaan ini menggambarkan kedekatan sang gubernur dengan pusat kekuasaan ditransformasikan menjadi sumber legitimasi regional yang mutlak. Dalam teori politik Indonesia mengenai hubungan pusat-daerah, wilayah luar Jawa terutama kawasan lingkaran luar seperti Maluku Utara secara historis sering kali ditempatkan dalam posisi perifer (pinggiran) yang memiliki ketergantungan fiskal dan politik yang tinggi terhadap episentrum kekuasaan di Jakarta. Oleh karena itu, kemampuan seorang kepala daerah untuk "menembus" sekat-sekat birokrasi Jakarta dan membawa pulang sumber daya ke daerah dibingkai oleh media sebagai sebuah prestasi eksekutif yang luar biasa. Ketergantungan struktural ini kemudian dikonstruksi secara positif, kedekatan dengan pusat kekuasaan diposisikan sebagai satu-satunya instrumen paling efektif untuk menggerakkan mobilitas sosial dan akselerasi pembangunan di tingkat lokal. Akibatnya, narasi media ini secara tidak langsung memperkuat model politik integratif yang menuntut daerah untuk selalu "tegak lurus" dan harmonis dengan pusat, ketimbang mengembangkan model politik regional yang otonom dan mandiri.

Di sinilah konsolidasi kekuatan hegemonik bekerja membentuk apa yang disebut sebagai hibrid hegemoni. Istilah hibrid hegemoni ini merujuk pada sebuah mekanisme pengondisian wacana di mana legitimasi politik lokal tidak lagi dibangun atas dasar resistensi atau kemandirian kedaerahan, melainkan melalui perpaduan harmonis antara kepatuhan struktural terhadap kekuasaan pusat dan pembuktian keberhasilan performatif di tingkat lokal.

Secara gender, fase *executive turn* ini secara masif menjauhkan figur pemimpin dari stereotip feminin tradisional yang melekat pada sifat domestik atau kelemahan manajerial. Gubernur perempuan diposisikan secara maskulin sebagai aktor eksekutif yang cakap melakukan penetrasi politik, lobi anggaran, dan negosiasi institusional lintas sektor. Representasi ini mengonsolidasikan konsep *technocratic femininity* yang didefinisikan sebagai konstruksi identitas kepemimpinan perempuan baru, dimana legitimasi politisnya tidak lagi bertumpu pada

simbolisme emosional, keibuan (*motherhood*), atau moralitas personal, melainkan divalidasi secara ketat melalui performa administratif, efisiensi manajerial, dan hasil nyata dari sebuah kebijakan eksekutif

Kontrol Akurasi melalui Angka Nominal dan Batas Waktu

Berita tentang pengembalian sisa anggaran mudik memperlihatkan konsistensi pola framing yang kokoh. *Headline* media lokal langsung menekankan tindakan instruktif dan batas waktu yang rigid, yakni "satu hari". Penggunaan angka nominal yang sangat spesifik dalam pemberitaan bukan sekadar pelengkap data, melainkan instrumen untuk memperkuat kesan transparansi dan kontrol penuh eksekutif atas aparatur di bawahnya. Melalui ketepatan angka dan kedisiplinan waktu ini, media berhasil membangun impresi bahwa tata kelola pemerintahan berada dalam kondisi yang prima dan terukur.

Tema utama yang muncul dari konstruksi teks tersebut adalah tata kelola bersih (*clean governance*) dan akuntabilitas. Menariknya, fokus pembingkai berita sama sekali bukan pada letak kesalahan birokrasi seperti mengapa terjadi surplus anggaran atau bagaimana perencanaan awal yang kurang akurat bisa terjadi tetapi secara eksklusif dialihkan pada aspek ketegasan gubernur. Fenomena ini merupakan bentuk nyata dari teknik *shifting emphasis*, sebuah strategi pembingkai di mana fokus perhatian publik sengaja digeser dari akar masalah atau potensi kegagalan sistemik (kelalaian administrasi) menuju ke arah respons moral dan manajerial sang pemimpin. Melalui cara ini, potensi skandal atau inefisiensi anggaran secara instan diubah menjadi sebuah panggung pertunjukan kepemimpinan moral yang memikat.

Dalam perspektif teori hegemoni, relokasi makna ini memicu terjadinya proses *moralization of authority*. Konsep ini dapat dipahami sebagai Suatu proses legitimasi kekuasaan di mana posisi dominan seorang aktor politik tidak lagi dijustifikasi semata-mata oleh hukum formal atau efektivitas teknisnya, melainkan oleh persepsi publik bahwa sang pemimpin bertindak atas dasar integritas etika, keluhuran moral, dan komitmen anti korupsi yang tinggi.

Kekuasaan pada titik ini dilegitimasi bukan hanya melalui efektivitas regulasi, tetapi melalui kurasi etika. Ketika media secara konsisten menampilkan tindakan korektif, seperti pemulangan anggaran sebagai bukti absolut dari

sebuah komitmen anti-korupsi, kesadaran publik diarahkan untuk melihat struktur kepemimpinan bukan sebagai bagian dari masalah, melainkan sebagai agen tunggal reformasi.

Dalam konteks politik dan kekuasaan yang lebih luas, teknik *shifting emphasis* ini memegang fungsi yang sangat strategis. Secara taktis, teknik ini bekerja sebagai alat manajemen reputasi dan mitigasi krisis defensif. Politik hegemoni membutuhkan instrumen yang mampu menetralkan kerentanan sebelum ia mengkristal menjadi oposisi publik. Dengan menerapkan *shifting emphasis*, aktor kekuasaan dapat mengalihkan perdebatan publik dari pertanyaan substantif mengenai kompetensi perencanaan anggaran menjadi narasi tentang heroisme penegakan disiplin serta mengubah peristiwa berisiko tinggi, surplus anggaran yang mencurigakan menjadi komoditas politik yang menguntungkan berupa pembuktian karakter pemimpin yang bersih.

Secara keseluruhan, jika ditarik garis lurus, keempat fase framing tersebut membentuk suatu pola komunikasi yang sangat koheren dan sekuensial : 1) Simbol Sejarah; 2) Rasionalitas Teknokratis; 3) Keberhasilan Eksekutif; 4) Moralitas Tata Kelola.

Pola berkesinambungan ini menunjukkan bahwa media lokal tidak lagi sekadar menjadi pelapor realitas objektif, melainkan berperan aktif sebagai aktor hegemoni yang mentransformasikan figur yang awalnya diasosiasikan dengan tragedi politik atau catatan masa lalu, menjadi sosok pemimpin teknokratis yang bersih dan terintegrasi secara utuh dalam hegemoni Nasional. Transformasi citra yang radikal ini bukanlah sebuah kebetulan tekstual yang terjadi secara organik, ini hasil dari sebuah kerja produksi makna yang sistematis, terstruktur, dan berorientasi pada pelestarian kekuasaan.

Sintesis Argumentatif: Gender, Hegemoni, dan Negosiasi Makna

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa framing media terhadap kepemimpinan perempuan di tingkat regional saat ini tidak lagi semata-mata berbasis pada stereotip gender tradisional yang domestik atau emosional. Meskipun demikian, legitimasi politik yang dibangun oleh media tersebut nyatanya tetap berada dalam orbit struktur kekuasaan yang dominan. Dalam dinamika ini, aspek gender memang diakui, tetapi sekaligus dinormalisasi agar tidak mengganggu status quo. Artinya, kepemimpinan perempuan diterima dan dirayakan sejauh ia kompatibel dengan

konfigurasi hegemoni relasi pusat-daerah. Dengan demikian, studi ini menunjukkan secara gamblang bahwa media lokal dapat berfungsi sebagai agen stabilisasi politik yang efektif melalui produksi narasi konsensus yang rapi.

Lebih jauh lagi, jika kita melihat dalam konteks Maluku Utara, pembingkaiannya tersebut berkontribusi besar pada pembentukan citra kepemimpinan perempuan yang rasional, tegas, dan akuntabel. Namun, di balik citra modern tersebut, figur ini tetap dijangkarkan secara kuat agar terintegrasi dalam struktur kekuasaan Nasional yang maskulin dan sentralistik. Di titik inilah, pertanyaan yang muncul bergeser menjadi lebih filosofis daripada sekadar persoalan tekstual, apakah fenomena ini merupakan bentuk kemajuan emansipatoris yang murni, atau justru sebatas adaptasi strategis perempuan di dalam medan hegemoni yang sebenarnya tidak pernah sepenuhnya berubah? Bagaimanapun, sejarah mencatat bahwa demokrasi sering kali bergerak bukan melalui revolusi simbolik yang radikal, melainkan melalui negosiasi makna yang pelan, samar, dan konsisten.

Secara teoretis, temuan ini membawa implikasi signifikan bagi studi komunikasi dan politik. Pertama, hasil penelitian ini menantang tesis usang yang melihat media lokal hanya sebagai instrumen marginal atau sekadar pelapor berita daerah, sebaliknya, media lokal terbukti bertindak sebagai laboratorium wacana yang canggih dalam merekayasa stabilitas politik makro. Kedua, dalam studi komunikasi gender, temuan ini menggeser fokus analisis dari sekadar "Bagaimana perempuan dipinggirkan oleh media" menuju "bagaimana kepemimpinan perempuan dirangkul dan dijinakkan oleh wacana hegemonik".

Studi ini menegaskan bahwa inklusi perempuan dalam panggung politik formal tidak secara otomatis meruntuhkan struktur kekuasaan lama. Sebaliknya, kekuasaan memiliki kapasitas adaptif yang luar biasa untuk menyerap narasi kesetaraan, menjadikannya bagian dari kosmetik birokrasi, dan menggunakannya kembali demi memperpanjang masa pakai legitimasi itu sendiri.

Kontribusi Teoretis

Penelitian ini menunjukkan bahwa framing media terhadap Sherly Tjoanda Laos dalam pemberitaan *Nuansamalut.com* membentuk pola naratif yang sistematis dan progresif. Media lokal tidak sekadar menyampaikan informasi faktual, melainkan aktif memproduksi legitimasi politik. Proses ini bergerak secara bertahap, mulai dari simbolisasi "gubernur perempuan pertama"

hingga konstruksi citra kepemimpinan yang teknokratis, eksekutif, dan akuntabel.

Temuan ini membuktikan bahwa representasi gender dalam politik lokal Indonesia telah mengalami pergeseran. Gender tidak lagi selalu direduksi menjadi stereotip emosional atau sekadar simbol domestik. Dalam konteks Maluku Utara, media lokal berhasil mengonstruksi figur perempuan sebagai aktor teknokratis yang rasional, berbasis data, dan memiliki posisi tawar yang kuat dengan kekuasaan pusat.

Pengakuan ini tidak sepenuhnya bersifat emansipatoris. Analisis hegemoni menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan Sherly Tjoanda Laos tetap dijangkarkan pada struktur kekuasaan nasional. Media membangun kepatuhan publik melalui narasi keselarasan visi dan kedekatan akses ke pusat kekuasaan. Dengan demikian, representasi gender yang progresif ini nyatanya berjalan berdampingan dengan reproduksi konsensus politik dominan.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan tiga kontribusi utama dalam lanskap studi komunikasi politik dan gender. Pertama, studi ini memperluas model framing Pan dan Kosicki dengan mengintegrasikannya secara utuh ke dalam analisis hegemoni Gramscian. Framing tidak lagi dibaca sebatas strategi tekstual yang berdiri sendiri, melainkan sebagai mekanisme produksi konsensus politik. Pendekatan ini membuktikan bahwa perangkat sintaksis, skrip, tematik, dan retorik memiliki implikasi ideologis besar yang bekerja jauh melampaui teks berita.

Kedua, penelitian ini memperkaya literatur gender dan media dengan memperkenalkan konsep *technocratic femininity* (feminitas teknokratis). Istilah ini merujuk pada konstruksi kepemimpinan perempuan yang dilegitimasi melalui performa administratif, kuantifikasi kebijakan, dan moralitas tata kelola. Konsep ini menawarkan perspektif baru untuk membaca transformasi politisi perempuan, keluar dari dikotomi tradisional yang menjebak antara simbol emansipasi radikal dan stereotip domestik.

Ketiga, pada level empiris, penelitian ini memberikan kontribusi kontekstual terhadap studi komunikasi politik di Indonesia Timur. Wilayah kepulauan memiliki karakteristik unik, terutama terkait relasi pusat-daerah yang kuat serta pluralitas identitas. Karakteristik ini menghadirkan medan hegemoni yang berbeda dengan wilayah metropolitan. Studi ini berhasil memperluas cakupan geografis penelitian framing yang selama ini terlalu berpusat di Jawa (*Java-centric*).

Implikasi penelitian ini bersifat ganda. Bagi kajian akademik, temuan ini menegaskan

pentingnya membaca media lokal sebagai arena produksi ideologi, bukan sekadar saluran informasi daerah. Bagi praktik jurnalistik, hasil ini memperlihatkan bagaimana pilihan bahasa dan struktur berita berperan besar dalam membentuk legitimasi politik, bahkan ketika berita tersebut diklaim netral dan faktual. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui analisis hanya berfokus pada satu media lokal *Nuansamalut.com* dan periode pengamatan relatif singkat, yaitu tiga bulan awal kepemimpinan.

Studi ini membuktikan bahwa demokrasi lokal bekerja melalui negosiasi makna yang sangat halus. Kepemimpinan perempuan kini dapat diterima dan dirayakan, namun penerimaan tersebut sering kali harus tunduk pada koridor yang digariskan oleh struktur kekuasaan yang lebih luas. Di sinilah letak paradoks politik modern, hegemoni tidak lagi datang melalui benturan fisik atau narasi yang koersif, melainkan menyusup secara meyakinkan lewat bahasa media yang tampak biasa, *headline* yang tampak informatif, dan metafora yang tampak sederhana.

IV. PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa framing media lokal terhadap kepemimpinan perempuan tidak berdiri di ruang hampa yang netral, melainkan beroperasi sebagai proses konstruksi makna yang berlapis dan sarat muatan ideologis. Melalui analisis mendalam terhadap korpus pemberitaan *Nuansamalut.com* mengenai Sherly Tjoanda Laos, disimpulkan bahwa struktur teks berita bergerak secara progresif untuk memproduksi legitimasi figur.

Secara substantif, temuan ini membuktikan adanya pergeseran paradigma representasi politisi perempuan di tingkat lokal. Kajian ini mendapati bahwa perempuan tidak lagi direduksi ke dalam stereotip domestik atau sekadar dijadikan simbol emansipasi yang artifisial. Media lokal telah mengonstruksi perempuan sebagai aktor politik yang rasional, profesional, dan teknokratis.

Meski demikian, transformasi citra tersebut tidak serta-merta bersifat emansipatoris murni. Proses dekonstruksi stereotip lama ini nyatanya dibarengi oleh proses kooptasi baru. Legitimasi yang dibangun media tetap dijangkarkan pada orbit hegemoni dominan, di mana eksistensi kepemimpinan perempuan regional dianggap sah sejauh ia mampu menunjukkan keselarasan politik (*political alignment*) dengan struktur kekuasaan nasional di pusat. Melalui agenda lanjutan tersebut, dinamika negosiasi makna

dalam demokrasi lokal Indonesia dapat dipetakan secara lebih utuh, presisi, dan komprehensif.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada Dr. Rahmat Abd Fatah, kolega di Fisip Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, yang telah membantu memberikan perspektif teoritik dan metodologi, serta diskusi yang berkualitas sehingga artikel penelitian ini dapat selesai tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Alerisa, and Didin Syarifuddin. "Perempuan Dan Dominasi Patriarki: Studi Sosiologis Tentang Dominasi Simbolik Dalam Rumah Tangga Di Sekadau: Women and Patriarchal Power: Sociological Study of Symbolic Domination within Household in Sekadau." *Journal of Marginal Social Research*, vol. 2, no. 2, 2025, pp. 26–35.
- Aliyamsyah Siregar, Ilham, et al. *Analisis Framing Pemberitaan Media Online Kompas. Com Dan Metrotvnews. Com Dalam Isu Politik Terhadap Polarisasi Pemilih Dalam Pemilu 2024 (Edisi Januari 2024)*. 2025, <http://e-theses.iaincurup.ac.id/8446/1/FULLtext.pdf>. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Aprillia, Bunga, et al. *Konsep Gender Dalam Ilmu Pemerintahan: Mewujudkan Pemerintahan Yang Berkeadilan Gender*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026.
- Basit. *Lensa Gender Di Media Massa: Meta Analisis Politisi Perempuan*. umsu press, 2022.
- Chesworth, Thomas. "'To Simone de Beauvoir, Who Gave Us Our Feminism': Beauvoir, Marxism and Method in New York City Women's Liberation, 1967–1970." *Paragraph*, vol. 48, no. 3, 2025, pp. 338–54.
- Daulay, Harmona, et al. *Perempuan: Dalam Bingkai Berbagai Perspektif Humaniora*. Star Digital Publishing, 2025.
- De Simone, Silvia, et al. "The Hegemonic Gender Order in Politics." *Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal*, vol. 37, no. 8, 2018, pp. 832–46.
- Firdausy, Muhammad Hananda. "Konstruksi Sosial Gender Di Masyarakat." *Gender & Society*, vol. 1, no. 9, 2022.
- Hayat. "Inklusivitas Affirmative Action Keterwakilan Perempuan Di Parlemen." *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 12, no. 2, 2015, pp. 1–36.
- Lau, Raymond W K. "Re-Theorizing News' Construction of Reality: A Realist-

- Discourse-Theoretic Approach." *Journalism*, vol. 13, no. 7, 2012, pp. 886–902.
- Lotulung, Leviane Jackelin Hera. "LEGISLATOR PEREMPUAN DAN KONSTITUEN (Studi Pada Legislator Perempuan Di DPRD Provinsi Sulawesi Utara)." *Kolase Komunikasi Di Indonesia*, 2017, pp. 349–62, https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/13387/20/BOOK_Leviane_JH_Lotulung_Legislator_Perempuan.pdf.
- Mahdi, Acan. "Berita Sebagai Representasi Ideologi Media." *Jurnal Al-Hikmah*, vol. 9, no. 2, 2015.
- Manurung, Marzuki, et al. "Peran Sosial Media Dan Budaya Politik Generasi Milenial Dalam Pemilu." *Jurnal Terapung : Ilmu - Ilmu Sosial*, vol. 6, no. 1, Feb. 2024, p. 1, <https://doi.org/10.31602/jt.v6i1.13300>.
- Martinisi, Alessandro. "Reconstructing Reality: How Radical Constructivism Unravels Echo Chambers in Online Platforms." *Constructivist Foundations*, vol. 21, no. 1, 2025, pp. 41–49.
- Ortner, Sherry B. "Gender Hegemonies." *Cultural Critique*, no. 14, 1989, pp. 35–80.
- Pan, Zhongdang, and Gerald M Kosicki. "Framing Analysis: An Approach to News Discourse." *Political Communication*, vol. 10, no. 1, 1993, pp. 55–75.
- Pildes, Richard H, and Elizabeth S Anderson. "Slingshot Arrows at Democracy: Social Choice Theory, Value Pluralism, and Democratic Politics." *Colum. L. Rev.*, vol. 90, 1990, p. 2121.
- Prys, Miriam. "Hegemony, Domination, Detachment: Differences in Regional Powerhood." *International Studies Review*, vol. 12, no. 4, 2010, pp. 479–504.
- Quinn Hegarty, Aoife. "Gendered Framing and Representation of Women in Irish Political Television Programming during the 2020 Formation of the Government of Ireland." *Feminist Media Studies*, vol. 25, no. 4, 2025, pp. 898–916.
- Rakowski, Roman, et al. "Digital Mythologies." *Society*, vol. 62, no. 5, 2025, pp. 677–86.
- Resnyansky, Lucy, et al. "Reasons behind Reasons: A Communitarian Reading of Women's Radicalization and Family Bombings in Southeast Asia." *Studies in Conflict & Terrorism*, vol. 47, no. 11, 2024, pp. 1533–58.
- Roces, Mina. *Gender in Southeast Asia*. Cambridge University Press, 2022.
- Ruray, Titiiek Arafiani, and Rheza Pratama. "POLITIK IDENTITAS DALAM PILGUB MALUKU UTARA 2018 (Studi Kasus Pada Pilgub Maluku Utara 2018 Dalam Perspektif Sosiologi Komunikasi Dan Politik)." *Kawasa*, XI, no. 2, 2020, pp. 29–38, <https://www.jurnal.umm.ac.id/index.php/kawasa/article/view/471>.
- Sari, Nila Kurnia, and Mulharnetti Syas. "Praktik Hegemoni Media Atas Isu Boikot Produk Prancis Pada Grup Trans Media." *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, vol. 20, no. 1, 2023, pp. 55–71.
- Simons, Margaret A, et al. "Simone de Beauvoir: An Interview." *Feminist Studies*, vol. 5, no. 2, 1979, pp. 330–45.
- Sinpeng, Aim, and Amalinda Savirani. "Women's Political Leadership in the ASEAN Region." *Westminster Foundation for Democracy*, vol. 15, 2022, pp. 2012–22.
- Siswati, Endah. "Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci." *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, vol. 5, no. 1, 2018, pp. 11–33, <https://doi.org/10.35457/translitera.v5i1.355>.
- Sonjaya, Soni, et al. "Framing Analysis Of The Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki Model Of The Vaccine Issue On The Online News Portal Tribunnews. Com." *Jurnal Multidisiplin Sahombu*, vol. 4, no. 01, 2024, pp. 246–55.
- Trabada, Antonio Losada, and Elba Maneiro. "Political Communication, Framing Strategies, and Public Opinion: Questions for the next Big Crisis." *Atlantic Journal of Communication*, vol. 34, no. 1, 2026, pp. 94–113.
- Vijayarasa, Ramona. *The Woman President: Leadership, Law and Legacy for Women Based on Experiences from South and Southeast Asia*. Oxford University Press, 2022.
- Walker, Heidi M, et al. "Wildfire in the News Media: An Intersectional Critical Frame Analysis." *Geoforum*, vol. 114, 2020, pp. 128–37.



Copyright© 2026. Julaiha Hi.Amin.